



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PENGAWASAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

Disampaikan oleh:
Padmoyo Tri Wikanto
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Makassar, 17 Juni 2019

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI



OUTLINE

- Peran DJBC
- Wilayah Kerja Kanwil DJBC Sulbagsel
- Pengertian Cukai
- Target penerimaan negara sektor cukai
- Tren pelanggaran di bidang cukai
- Pengawasan cukai HT
- Sinergi DJBC-Pemda



PERAN DJBC

MISI DJBC

1

Memfasilitasi perdagangan dan industri;

2

Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan

3

Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai



WILAYAH KERJA KANWIL DJBC SULBAGSEL



- ❑ 1 KANWIL & 4 KPPBC
- ❑ 3 PROPINSI (SULSEL, SULBAR, SULTRA)
- ❑ 47 KABUPATEN/KOTA
- ❑ 4 PELABUHAN BESAR
- ❑ 1 BANDAR UDARA INT'L
- ❑ 1 POS LALU BEA

PENGERTIAN CUKAI



- ❑ Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.

(Ketentuan menimbang huruf b UU No. 39 Tahun 2007)

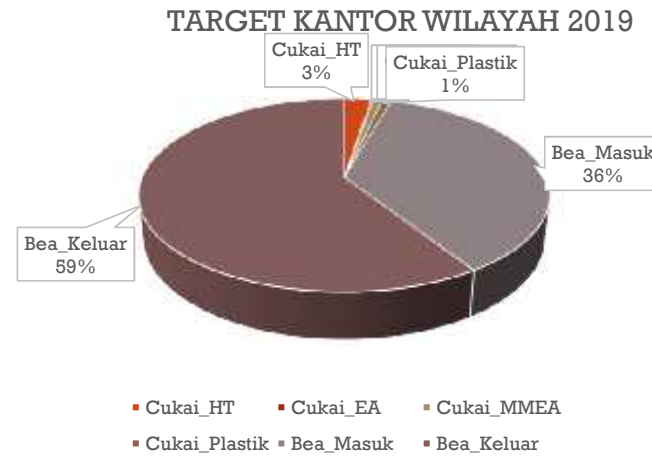
- ❑ Sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai:
 - a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. Peredarannya perlu diawasi;
 - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

(Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007)

- ❑ Barang kena cukai (BKC) meliputi:
 - a. Hasil tembakau (HT)
 - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
 - c. Etil Alkohol (EA)



TARGET PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI



Penerimaan cukai HT di Wilayah Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan:

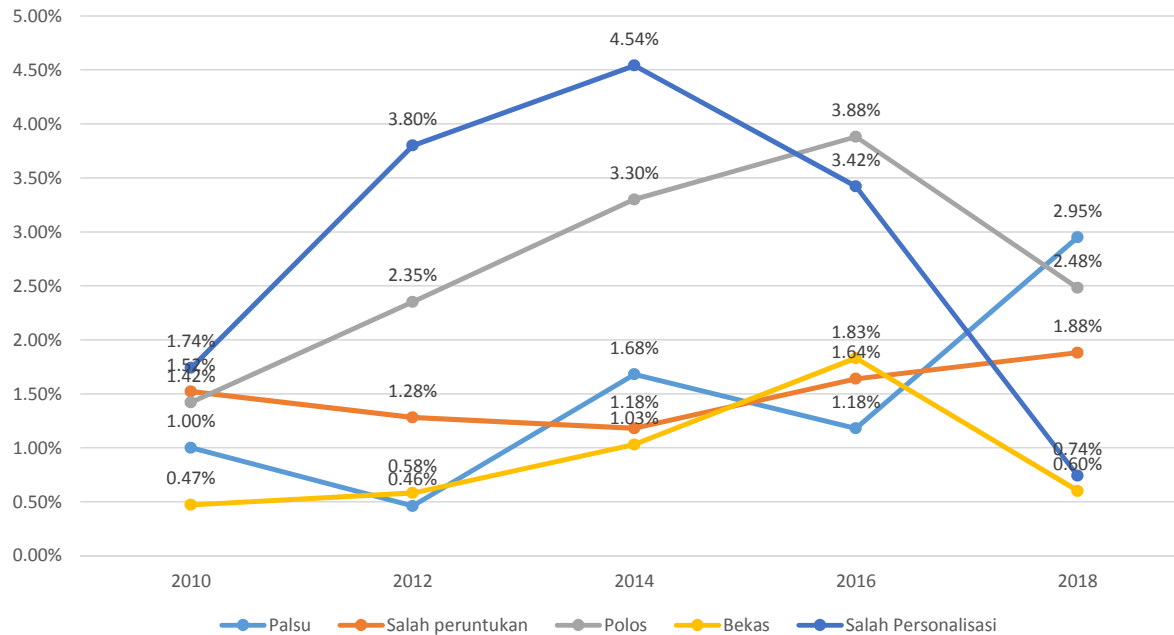
- ❑ Relisasi Penerimaan Cukai HT tahun 2018 sebesar Rp17,35 milyar, meningkat dari realisasi tahun 2017 yang sebesar Rp1,18 milyar.
- ❑ Target Cukai HT 2019 sebesar Rp15,84 milyar, dan realisasi per Juni 2019 sebesar Rp5,07 milyar.
- ❑ Kontribusi cukai HT di Sulawesi Selatan hanya melalui KPPBC Pare-Pare, terdiri 16 perusahaan, 2 (dua) SKM dan 14 (empat belas) SKT.

NO	JENIS	TARGET NASIONAL (MILYAR)	
		2019	PERSEN
1	Cukai_HT	158.855,59	76.07%
2	Cukai_EA	158,21	0.08%
3	Cukai_MMEA	5.987,19	2.87%
4	Cukai_Plantik	500,00	0.24%
5	Bea_Masuk	38.899,30	18.63%
6	Bea_Keluar	4.422,50	2.12%
Total		208.822,80	100.00%

NO	JENIS	TARGET KANTOR WILAYAH (MILYAR)	
		2019	PERSEN
1	Cukai_HT	15,83	2.55%
2	Cukai_EA	1,13	0.18%
3	Cukai_MMEA	5,38	0.87%
4	Cukai_Plantik	4,93	0.79%
5	Bea_Masuk	227,17	36.53%
6	Bea_Keluar	367,36	59.08%
Total		621,81	100.00%

TREN PELANGGARAN CUKAI HT

Time series Survey Rokok Illegal oleh UGM



Data Survey Rokok Illegal 2010, 2012, 2014 oleh PSEKP UGM dan 2016 oleh P2EB UGM

Tahun 2019 diproyeksikan, tingkat pelanggaran rokok ilegal di bawah 3%

SURVEI PELANGGARAN 2018

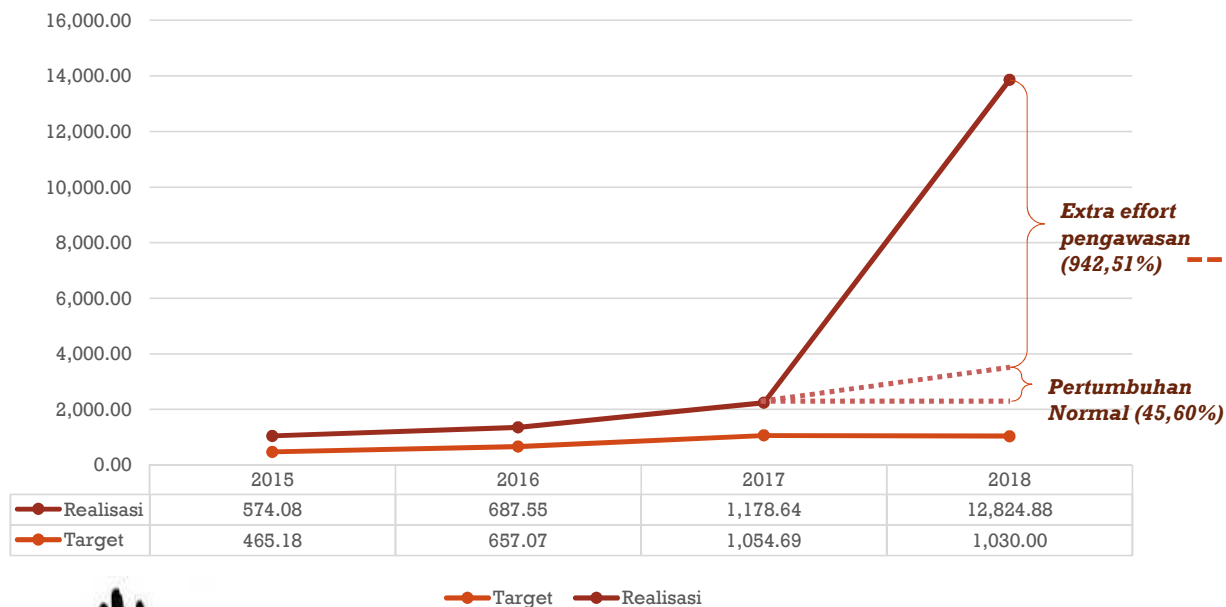


JNS_PLGRN	PERSEN
Palsu	2.95%
Salah peruntukan	1.88%
Polos	2.48%
Bekas	0.60%
Salah Personalisasi	0.74%
	8.65%



EFFORT PENGAWASAN

TARGET & REALISASI
(Juta Rupiah)



Statistik Penindakan 2018

JENIS	KUANTITAS
Jumlah Penindakan	453 SBP
Jumlah Barang Sitaan	47,77 Juta Batang
Nilai Barang	32,70 Milyar
Potensi Kerugian Keuangan Negara	16.36 Milyar

Bentuk-bentuk upaya *extra effort* pengawasan cukai HT oleh DJBC:

1. Operasi patuh ampakan 1 dan 2 tahun 2017;
2. Operasi gempur 2018;
3. Operasi pasar regular;
4. Koordinasi dengan daerah produsen serta operasi intelijen; dan
5. Pengawasan lainnya.

Jika rokok illegal ditekan, maka potensi pasarnya yang kosong dapat diisi dengan rokok legal. Penindakan yang masiv ditahun 2018 yang diikuti dengan peningkatan penerimaan Cukai menunjukkan kebenaran hipotesis tersebut.



PENGAWASAN CUKAI HT: SASARAN PENGAWASAN

PRODUKSI

1. Pengawasan terhadap mesin rokok (legalitas dan kapasitas);
2. Pengawasan produksi SKT dan/atau SKM;
3. Pengawasan pemesanan pita cukai yang tidak sesuai (buka haknya);
4. Pengawasan penggunaan pita cukai palsu/polos;
5. Pengawasan terhadap golongan;
6. Audit di bidang cukai; dll

DISTRIBUSI

1. Pengawasan terhadap pengangkutan BKC HT yang tidak dilindungi CK-5;
2. Pengawasan distribusi BKC HT di pintu masuk (Bandara, Pelabuhan, Kantor Pos, Perusahaan Jasa Kiriman);

PEMASARAN

1. Pengawasan peredaran rokok polos/pita cukai palsu;
2. Pengawasan terhadap HJE;
3. Pengawasan BKC HT tidak sesuai peruntukannya (personalisasi);
4. Pengawasan BKC HT yang bukan haknya (SKT-SKM).

STOP
ROKOK ILEGAL

SINERGI DJBC-PEMDA,

A. UPAYA PENGENDALIAN BKC ILEGAL

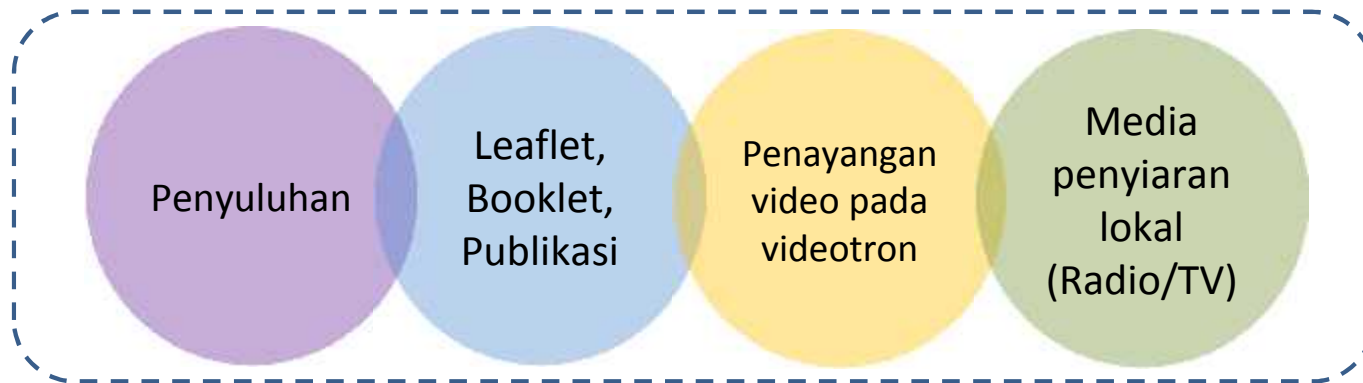


- Pemerintah Daerah dengan segala unsur perangkat yang dimiliki dapat menginformasikan kepada DJBC apabila terdapat indikasi bentuk-bentuk pelanggaran di bidang cukai, sehingga dapat segera dilakukan penindakan;
- Pemerintah daerah agar melakukan pendataan dan pengawasan mesin rokok.



SINERGI DJBC-PEMDA

B. BENTUK SOSIALISASI



Thank You!

